

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Akuntansi

1. Pengantar Akuntansi

Akuntansi adalah pengukuran, penjabaran atau pemberian kepastian mengenai informasi yang akan membantu manajer, investor, otoritas pajak dan pembuat keputusan lain untuk membuat alokasi sumber daya keputusan didalam perusahaan, organisasi, dan lembaga pemerintah. Akuntansi adalah seni dalam mengukur, berkomunikasi dan menginterpretasi aktivitas keuangan. Secara luas, akuntansi juga dikenal sebagai “Bahasa Bisnis”. Akuntansi bertujuan untuk menyiapkan suatu laporan keuangan yang akurat agar dapat dimanfaatkan oleh para manajer, pengambilan kebijakan, dan pihak yang berkepentingan lainnya, seperti pemegang saham, kreditur, atau pemilik. Pencatatan harian yang terlibat dalam proses ini dikenal dengan istilah pembukuan.¹⁰

Akuntansi *accounting* berbeda dengan pembukuan *book keeping*. Pembukuan hanya meliputi aktivitas pencatatan semata sedangkan akuntansi meliputi seluruh proses pelaporan mulai dari pengidentifikasian transaksi bisnis, pencatatan, pengkomunikasian dalam bentuk laporan sampai pada tahap analisis dan interpretasi. Jadi, dapat disimpulkan bahwa fungsi pembukuan (pencatatan) merupakan bagian dari seluruh proses akuntansi (pelaporan). Profesi akuntansi telah mengembangkan seperangkat standar

¹⁰ Lantip Susilowati, *Mahir Akuntansi Perusahaan Jasa Dan Dagang*, (Yogyakarta: KALIMEDIA, 2016), hal 1-2

yang berlaku umum dan diterima universal. Standar ini dinamakan sebagai prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum *generally accepted accounting principles*. Standar ini diperlakukan sebagai patokan atau pedoman dalam penyusunan laporan keuangan yang baku. Dengan adanya standar ini, pihak manajemen selaku pengelola dana dan aktivitas perusahaan dapat mencatat, mengikhtisarkan, dan melaporkan hasil kegiatan operasional maupun finansial perusahaan yang secara standar diterima umum dan transparan. Laporan keuangan yang disusun manajemen berdasarkan standar atau prinsip akuntansi yang berlaku umum ini merupakan salah satu bentuk dari pertanggung jawaban manajemen kepada investor selaku pemilik dana.¹¹

2. Persamaan Dasar Akuntansi

Sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh perusahaan dinamakan aset/harta/kekayaan. Aset ini selanjutnya akan digunakan atau dimanfaatkan oleh perusahaan demi lancarnya kegiatan operasional sehari-hari contoh dari aset meliputi uang kas, piutang usaha, persediaan barang dagang, perlengkapan toko dan kantor, asuransi dan sewa dibayar dimuka, tanah, bangunan, peralatan, perabotan toko dan kantor, kendaraan, operasional dan aset lainnya. Piutang usaha dikatakan aset karena piutang ini nantinya akan dapat dicairkan di *convert* dari piutang menjadi uang kas, sebagai hasil dari penagihan penjualan. Bidang usaha mencerminkan hak perusahaan untuk menagih kepada *customer* atau pelanggan demi mendapatkan uang kas. Persediaan barang dagangan merupakan aset karena nantinya akan dijual oleh perusahaan kepada pelanggan untuk mendapatkan piutang

¹¹ Hery, *Pengantar Akuntansi*, (Gramedia: Jakarta 2015), hal 8.

(hak menagih) maupun kas pada akhirnya. Sedangkan untuk perlengkapan toko dan kantor, asuransi dan sewa dibayar dimuka, tanah, bangunan, peralatan perabot toko dan kantor dan kendaraan operasional dikatakan aset karena mereka memiliki manfaat ekonomi bagi perusahaan untuk dapat digunakan atau dikonsumsi konsumsi selama periode akuntansi.¹²

Ekuitas merupakan hak pemilih dan atau pemegang saham atas aset perusahaan. Ekuitas untuk perusahaan perorangan dinamakan ekuitas pemilik *owner equity*, untuk firma persekutuan dinamakan *partner shipequity*, sedangkan untuk perseroan dinamakan ekuitas pemegang saham *stakeholder equity*. Ekuitas atau modal disebut juga sebagai kekayaan bersih *net asset*, yang artinya bahwa hak (klaim) pemilik atau pemegang saham atas kekayaan perusahaan diperoleh setelah seluruh kekayaan yang ada dalam perusahaan dikurangi dengan seluruh kewajiban perusahaan. Hubungan kekayaan, kewajiban dan ekuitas dapat dirumuskan dalam sebuah persamaan akuntansi yaitu $aset = liabilitas + ekuitas$ rumusan persamaan akuntansi di atas sifatnya baku atau mutlak di mana liabilitas harus ditempatkan terlebih dahulu sebelum ekuitas, ini mengandung makna bahwa kreditur memiliki hak yang pertama atas kekayaan perusahaan, setelah itu sisa aset yang masih ada berlaku merupakan hak pemilik dana pemegang saham.¹³

3. Pelaporan Keuangan

Laporan keuangan pada perusahaan merupakan hasil akhir dari kegiatan akuntansi yang mencerminkan kondisi keuangan dan hasil operasi perusahaan. Informasi tentang kondisi keuangan dan hasil dari operasi perusahaan

¹²Hery, *Pengantar Akuntansi*., hal. 12-13

¹³*Ibid.*., hal. 13-14.

sangat berguna bagi berbagai pihak, baik pihak internal perusahaan maupun pihak eksternal perusahaan. Oleh karena itu, laporan keuangan yang dipakai sebagai alat untuk berkomunikasi dengan pihak-pihak yang berkepentingan dengan data keuangan perusahaan. Itulah sebabnya laporan keuangan itu sering disebut juga *language of business*.

Tujuan laporan keuangan menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) per 1 oktober 2004, yang dirumuskan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) adalah

“ Menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ”

Perumusan oleh IAI tersebut adalah bahwa tujuan dari dibuatnya laporan keuangan dimaksudkan untuk sejumlah besar pemakai yang berarti bukan untuk suatu kelompok tertentu saja. Pihak-pihak yang berkepentingan dalam laporan keuangan adalah pihak internal dan pihak eksternal.¹⁴

a. Pihak Internal¹⁵

- 1) Pihak Manajemen, berkepentingan langsung dan sangat membutuhkan informasi keuangan untuk tujuan pengendalian, pengoorganisasian, dan perencanaan.
- 2) Pemilik perusahaan, dengan menganalisis laporan keuangannya pemilik dapat menilai berhasil atau tidaknya manajemen dalam memimpin perusahaan.

¹⁴ Arief Sugiono, *Akuntansi dan pelaporan keuangan Untuk Bisnis Skala Kecil dan Menengah*, (Jakarta:Grasindo,2009), hal. 6

¹⁵ Arief Sugiono, *Akuntansi dan pelaporan keuangan Untuk Bisnis Skala Kecil dan Menengah...*, hal. 7

- 3) Karyawan, berkepentingan dengan laporan keuangan dari perusahaan tempat mereka bekerja karena sumber penghasilan mereka bergantung pada perusahaan yang bersangkutan.

b. Pihak Eksternal

- 1) Investor, memerlukan analisis laporan keuangan dalam rangka penentuan kebijakan penanaman modalnya. Bagi investor yang penting adalah tingkat imbalan hasil dari modal yang telah atau akan ditanam dalam suatu perusahaan tersebut.
- 2) Kreditur, merasa berkepentingan terhadap pengembalian /pembayaran kredit yang telah diberikan kepada perusahaan, mereka perlu mengetahui kinerja keuangan jangka pendek (likuiditas), dan profitabilitas dari perusahaan.
- 3) Pemerintah, informasi ini sangat berguna untuk tujuan pajak dan juga oleh lembaga yang lain seperti Statistik.

Seperti telah dijelaskan di atas bahwa laporan keuangan merupakan hasil tindakan pembuatan ringkasan data keuangan perusahaan. Laporan keuangan terdiri dari 4 laporan dasar, yaitu neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan modal, dan laporan arus kas. Berikut ini adalah keterangan dari satu persatu laporan keuangan.

- a) Neraca menunjukkan posisi keuangan yang meliputi kekayaan, kewajiban, serta modal pada waktu tertentu, seperti tanggal 31 Desember 2006.

- b) Laporan laba rugi, menyajikan hasil usaha perusahaan yang meliputi pendapatan dan biaya (beban) yang dikeluarkan sebagai akibat dari pencapaian tujuan dalam suatu periode tertentu.
- c) Laporan perubahan modal, yang memuat tentang saldo awal dan akhir laba ditahan dalam neraca untuk menunjukkan suatu analisis perubahan tentang besarnya laba selama jangka waktu tertentu
- d) Laporan arus kas, memperlihatkan aliran kas selama periode tertentu, serta memberikan informasi terhadap sumber-sumber kas serta penggunaan kas dari setiap kegiatan dalam periode yang dicakup.¹⁶

B. Standar Akuntansi Keuangan

Laporan keuangan untuk tujuan umum dibuat untuk memenuhi kebutuhan sebagian besar pengguna laporan keuangan. Pengguna laporan keuangan beragam dengan memiliki kebutuhan yang berbeda. Oleh karena itu, untuk menyusun laporan keuangan ini diperlukan standar akuntansi. Penyusun tidak mungkin untuk menjelaskan kepada pihak eksternal cara asumsi dan konsep-konsep dasar penyusunan laporan keuangan. Pemakai laporan keuangan perlu untuk membandingkan kinerja antar entitas, sehingga keseragaman dalam penyajian dapat memudahkan pemakai dalam membaca dan menganalisis. Standar berfungsi memberikan acuan dan pedoman dalam penyusunan laporan keuangan sehingga laporan keuangan antar entitas menjadi lebih seragam. Manajemen lebih mudah menyusun laporan keuangan karena pedoman memberikan ketentuan cara penyusunan tersebut. Standar akuntansi berisikan pedoman penyusunan laporan keuangan. Standar akuntansi terdiri atas rerangka konseptual berisikan tujuan,

¹⁶Arief Sugiono, *Akuntansi dan pelaporan keuangan Untuk Bisnis Skala Kecil dan Menengah...*, hal. 8

komponen laporan, karakteristik kualitatif dan asumsi dalam penyusunan laporan keuangan.¹⁷

Menurut Riahi-Belkaoui, ada empat alasan mengapa standar akuntansi dibuat, yaitu:

- 1) Standar memberikan informasi mengenai posisi keuangan penyelenggaraan sebuah perusahaan kepada para pengguna informasi akuntansi. Informasi ini dianggap jelas, konsisten, andal, dan dapat diperbandingkan.
- 2) Standar memberikan pedoman dan aturan tindakan bagi para akuntan publik yang memungkinkan mereka untuk menerapkan kehati-hatian dan kebebasan dalam “menjual” keahlian dan integritas mereka dalam mengaudit laporan-laporan perusahaan dan membuktikan validitas dari laporan-laporan tersebut.
- 3) Standar memberikan database kepada pemerintah mengenai berbagai variabel yang dianggap sangat penting dalam pelaksanaan perpajakan, regulasi perusahaan, perencanaan dan regulasi ekonomi, serta peningkatan efisiensi dan sasaran-sasaran sosial lainnya.
- 4) Standar menumbuhkan minat dalam prinsip-prinsip dan teori-teori bagi mereka yang memiliki perhatian dalam disiplin ilmu akuntansi. Mengingat pentingnya Standar Akuntansi Keuangan (SAK) maka mekanisme penyusunannya harus sedemikian rupa sehingga memberikan kepuasan kepada semua pihak yang berkepentingan. Sehingga Standar Akuntansi Keuangan (SAK) merupakan pedoman bagi siapa saja dalam menyusun laporan keuangan yang akan diterima secara umum. Standar akuntansi mencakup konvensi, peraturan, dan prosedur yang sudah disusun

¹⁷ Ati Retna et al., *Akuntansi Keuangan Berbasis PSAK*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2017), hal 10

dan disahkan oleh lembaga resmi pada saat tertentu. Standar akuntansi menjelaskan transaksi yang harus dicatat, bagaimana mencatatnya dan bagaimana mengungkapkannya dalam laporan keuangan yang disajikan. Di Indonesia, badan yang berwenang untuk menyusun standar akuntansi yaitu Dewan Standar Akuntansi yang berada dibawah Ikatan Standar Akuntansi (IAI) sebagai organisasi profesi akuntan.¹⁸ IAI telah menghimpun prinsip-prinsip akuntansi yang dijadikan standar pelaporan keuangan di Indonesia yang dituangkan dalam buku Standar Akuntansi Keuangan (SAK).

Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) merupakan organisasi profesi yang menaungi seluruh akuntan di Indonesia. Salah satu peran penting di organisasi ini adalah mendukung penegakan transparan dan akuntabilitas pelaporan keuangan entitas di Indonesia. Dalam rangka menjalankan peran dan fungsinya IAI telah menyusun standar akuntansi sesuai dengan kebutuhan berbagai entitas di Indonesia, baik entitas bisnis maupun nirlaba, publik, dan privat.

IAI menyadari bahwa UMKM memiliki peran yang sangat penting dalam perekonomian nasional. Dalam rangka mewujudkan UMKM Indonesia yang maju, mandiri, dan modern. Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) IAI telah mengesahkan *Exposure Draft* Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil Menengah (ED SAK EMKM) dalam rapatnya pada tanggal 18 Mei 2016. Sebelumnya IAI juga menerbitkan SAK Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (ETAP)

¹⁸A. Riahi-Belkaoui, *Accounting Theory*, (Jakarta: Salemba Empat, 2006), hal. 34.

pada tahun 2009 untuk mendukung pelapora keuangan entitas yang tidak mengharuskan adanya akuntabilitas publik.¹⁹

C. Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil Menengah (SAK-EMKM)

SAK EMKM ini diluncurkan secara resmi pada tanggal 8 Desember dan berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2018. Penerbitan SAK EMKM ini diharapkan dapat menjadi pendorong literasi keuangan bagi UMKM di Indonesia sehingga memperoleh akses yang semakin luas untuk memperoleh pembiayaan dari industri perbankan yang selama ini merupakan masalah klasik bagi UMKM di Indonesia. SAK EMKM ini diharapkan dapat menjadi dasar penyusunan dan pengembangan pedoman atau panduan akuntansi bagi UMKM yang bergerak di berbagai bidang usaha.

SAK EMKM ditujukan untuk entitas bisnis yang tidak atau belum mampu memenuhi persyaratan akuntansi yang diatur dalam SAK ETAP. Tujuan dari SAK EMKM untuk memenuhi kebutuhan pelaporan EMKM. Undang-Undang yang relevan sebagai acuan pengaturan tentang definisi, kriteria, dan tentang kuantitatif usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), diantaranya adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 dan UU No 1 Tahun 2013. SAK EMKM ini merupakan dorongan kepada pengusaha-pengusaha di Indonesia agar dapat berkontribusi secara signifikan dalam pengembangan UMKM yang lebih maju.²⁰

¹⁹I Wayan Rusastra, *Paket Kebijakan Ekonomi Dan Akuntansi Keuangan*, (Jakarta:Yayasan Pustaka Obor,2018), hal.61

²⁰I Wayan Rusastra, *Paket Kebijakan Ekonomi Dan Akuntansi Keuangan...*, hal.65-66

1. Laporan Keuangan menurut SAK EMKM

Menurut SAK EMKM, laporan keuangan memiliki tujuan untuk menyediakan informasi posisi keuangan, kinerja keuangan dan laporan arus kas suatu entitas yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi oleh siapa pun yang tidak dalam posisi dapat meminta laporan keuangan khusus untuk memenuhi kebutuhan informasi tersebut. Pengguna tersebut meliputi penyedia sumber daya bagi entitas, seperti kreditor maupun investor. Dalam memenuhi tujuannya, laporan keuangan juga menunjukkan apa yang telah dilakukan manajemen (*stewardship*) atau pertanggungjawaban manajemen atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya.

Pos-pos yang akan muncul dalam laporan keuangan berdasarkan SAK EMKM adalah aset, liabilitas, penghasilan, dan beban. Berikut ini merupakan penjelasan pengakuan masing-masing pos dalam laporan keuangan SAK EMKM

1) Aset

Aset diakui dalam laporan keuangan ketika manfaat ekonominya di masa depan dapat dipastikan akan mengalir ke dalam entitas dan aset tersebut memiliki biaya yang dapat diukur dengan andal. Aset tidak diakui dalam laporan posisi keuangan jika manfaat ekonominya dipandang tidak mungkin mengalir ke dalam entitas walaupun pengeluaran telah terjadi. Sebagai alternatif, transaksi tersebut menimbulkan pengakuan beban dalam laporan laba rugi.

2) Liabilitas

Liabilitas diakui dalam laporan posisi keuangan jika pengeluaran sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi dipastikan akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban entitas dan jumlah yang harus diselesaikan dapat diukur secara andal.

3) Penghasilan atau pendapatan

Penghasilan diakui dalam laporan laba rugi jika kenaikan manfaat ekonomi di masa depan yang berkaitan dengan kenaikan aset atau kenaikan liabilitas telah terjadi dan dapat diukur secara andal.

4) Beban²¹

Beban diakui dalam laporan laba rugi jika penurunan manfaat ekonomi di masa depan yang berkaitan dengan penurunan aset atau kenaikan liabilitas telah terjadi dan dapat diukur secara andal.

Pengukuran adalah proses penetapan jumlah uang untuk mengakui jumlah uang untuk mengakui aset, liabilitas, penghasilan, dan beban di dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran unsur laporan keuangan dalam SAK EMKM adalah biaya historis. Biaya Historis suatu aset adalah sebesar jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan untuk memperoleh aset tersebut pada saat perolehan. Biaya historis suatu liabilitas adalah sebesar jumlah kas atau setara kas yang diterima atau jumlah kas yang diperkirakan akan dibayarkan untuk memenuhi liabilitas dalam pelaksanaan usaha normal.

²¹Ikatan Akuntan Indonesia, *Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah* (Jakarta: Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia, 2018), hal 6

Dalam penyajian laporan keuangan berdasarkan SAK EMKM laporan keuangan minimum, meliputi Laporan posisi keuangan pada akhir periode, Laporan laba rugi selama periode, Catatan atas laporan keuangan, yang bersisi tambahan dan rincian pos-pos tertentu yang relevan. Entitas mengidentifikasi secara jelas setiap laporan keuangan dan catatan atas laporan keuangan.²² Selain itu, entitas menunjukkan informasi berikut dengan jelas dan diulangi bilamana perlu untuk pemahaman informasi yang disajikan.²³

- 1) Nama entitas yang menyusun dan menyajikan laporan keuangan
- 2) Tanggal akhir periode pelaporan dan menyajikan laporan keuangan
- 3) Rupiah sebagai mata uang penyajian, dan
- 4) Pembulatan angka yang digunakan dalam penyajian laporan keuangan.

2. Laporan Posisi Keuangan

Menurut SAK EMKM, Laporan Posisi Keuangan minimal mencakup pos-pos sebagai berikut :

- 1) Kas
- 2) Piutang
- 3) Persediaan
- 4) Aset Tetap
- 5) Utang Usaha
- 6) Utang Bank
- 7) Ekuitas

²²Ikatan Akuntan Indonesia, *Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah...*, hal 6

²³*Ibid.*, hal. 8-9

Entitas menyajikan pos dan bagian dari pos dalam laporan posisi keuangan jika penyajian tersebut relevan untuk memahami posisi keuangan entitas. SAK EMKM tidak menentukan format atau urutan terhadap pos-pos yang disajikan. Meskipun demikian, entitas dapat menyajikan pos-pos aset berdasarkan urutan likuiditas dan pos-pos liabilitas berdasarkan urutan jatuh tempo.

3. Laporan Laba Rugi

Dalam SAK EMKM (2016), laporan laba rugi mencakup pos-pos sebagai berikut :²⁴

- 1) Pendapatan
- 2) Beban Keuangan
- 3) Beban Pajak

Entitas menyajikan pos dan bagian dari pos dalam laporan laba rugi jika penyajian tersebut relevan untuk memahami kinerja keuangan entitas. Laporan laba rugi memasukkan semua penghasilan dan beban yang diakui dalam suatu periode, kecuali SAK EMKM mensyaratkan hal lain. SAK EMKM mengatur perlakuan atas dampak koreksi atas kesalahan dan perubahan kebijakan akuntansi yang disajikan sebagai penyesuaian retrospektif terhadap periode yang lalu dan bukan sebagai laba atau rugi dalam periode terjadinya perubahan.

4. Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK)

Menurut SAK EMKM, catatan atas laporan keuangan memuat :

- 1) Suatu pernyataan bahwa laporan keuangan telah disusun sesuai dengan SAK EMKM

²⁴ Ikatan Akuntan Indonesia, *Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah...*, hal. 9 11

- 2) Ikhtisar kebijakan akuntansi Informasi tambahan dan rincian pos tertentu yang menjelaskan transaksi penting dan material sehingga bermanfaat bagi pengguna untuk memahami laporan keuangan.

Jenis informasi tambahan dan rincian yang disajikan bergantung pada jenis kegiatan usaha yang dilakukan oleh entitas. Catatan atas laporan keuangan disajikan secara sistematis sepanjang hal tersebut praktis. Setiap pos dalam laporan keuangan merujuk-silang ke informasi terkait dalam Catatan Atas Laporan Keuangan.²⁵

5. Contoh laporan Keuangan berdasarkan SAK EMKM

Berikut ini merupakan contoh laporan keuangan berdasarkan SAK EMKM dari contoh ilustratif laporan keuangan entitas dalam SAK EMKM.

Tabel 2.1
Laporan Keuangan Entitas berdasarkan SAK EMKM

ENTITAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 20X7 DAN 2X8	
DAFTAR ISI	
LAPORAN POSISI KEUANGAN.....	1
LAPORAN LABA RUGI.....	2
LAPORAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN.....	3

Sumber : Ikatan Akuntan Indonesia, Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah.

²⁵ Ikatan Akuntan Indonesia, *Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah*..., hal 13

Tabel 2.2
Laporan Posisi Keuangan

ENTITAS XXX LAPORAN POSISI KEUANGAN 31 DESEMBER 20XX			
	Catatan	20x8	20x7
ASET			
Kas dan Setara Kas	3	xxx	xxx
Piutang Usaha ⁴		xxx	xxx
Persediaan		xxx	xxx
Beban dibayar dimuka	5	xxx	xxx
Aset Tetap		xxx	xxx
Akumulasi Penyusutan		(xxx)	(xxx)
JUMLAH ASET		xxx	xxx
LIABILITAS			
Utang Usaha		xxx	xxx
Utang Bank	6	xxx	xxx
JUMLAH LIABILITAS		xxx	xxx
EKUITAS			
Modal		xxx	xxx
Saldo laba	7	xxx	xxx
JUMLAH EKUITAS		xxx	xxx
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS		xxx	xxx

Sumber : Ikatan Akuntan Indonesia, Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah²⁶

Tabel 2.3
Laporan Laba Rugi

ENTITAS XXX LAPORAN LABA RUGI 31 DESEMBER 20XX			
	Catatan	20x8	20x7
PENDAPATAN			
Pendapatan Usaha	8	xxx	xxx
Pendapatan lain-lain		xxx	xxx
JUMLAH PENDAPATAN		xxx	xxx
BEBAN			
Beban Usaha		xxx	xxx
Beban Lain-lain	9	xxx	xxx
JUMLAH BEBAN		xxx	xxx
LABA RUGI SEBELUM PAJAK		xxx	xxx
Pajak Penghasilan		xxx	xxx
LABA RUGI SETELAH PAJAK PENGHASILAN		xxx	xxx

Sumber : Ikatan Akuntan Indonesia, Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah²⁷

²⁶Ikatan Akuntan Indonesia, *Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah...*, hal 47

²⁷*Ibid.*, hal 51

Tabel 2.4
Catatan Atas Laporan Keuangan

ENTITAS XXX CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 20XX		
1. UMUM		
Entitas didirikan di Jakarta berdasarkan akta Nomor xx tanggal 1 Januari 20x7 yang dibuat dihadapan Notaris, S.H., notaris di Jakarta dan mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. Xx 2016 tanggal 31 Januari 2016. Entitas bergerak dalam bidang usaha manufaktur. Entitas memenuhi kriteria sebagai entitas mikro, kecil, dan menengah sesuai UU Nomor 20 Tahun 2008. Entitas berdomisili di Jalan xx, Jakarta Utara.		
2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING		
<p>a) Pernyataan Kepatuhan Laporan keuangan disusun menggunakan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah.</p> <p>b) Dasar Kepatuhan Dasar penyusunan laporan keuangan adalah biaya historis dan menggunakan asumsi dasar akrual. Mata uang penyajian yang digunakan untuk penyusunan laporan keuangan adalah Rupiah.</p> <p>c) Piutang Usaha Piutang usaha disajikan sebesar jumlah tagihan.</p> <p>d) Persediaan Biaya persediaan bahan baku meliputi biaya pembelian dan biaya angkut pembelian. Biaya konversi meliputi biaya tenaga kerja langsung dan overhead.</p> <p>e) Aset Tetap Aset tetap dicatat sebesar biaya perolehannya jika aset tersebut dimiliki secara hukum oleh entitas. Aset tetap disusutkan menggunakan metode garis lurus tanpa nilai residu.</p> <p>f) Pengakuan pendapatan dan Beban Pendapatan penjualan diakui ketika tagihan diterbitkan atau pengiriman dilakukan kepada pelanggan. Beban diakui saat terjadi.</p> <p>g) Pajak Penghasilan Pajak penghasilan yang mengikuti ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia.</p>		
3. KAS DAN SETARA KAS		
	20x7	20x8
a) Kas kecil di Jakarta-Rupiah	xxx	xxx
b) Giro PT Bank xxx-Rupiah	xxx	xxx
c) Deposito:		
PT Bank xxx-Rupiah	xxx	xxx
Suku Bunga- Rupiah	xxx	xxx
1. PIUTANG USAHA		
Toko A	xxx	xxx
Toko B	xxx	xxx
Toko C	xxx	xxx
5. BEBAN DIBAYAR DIMUKA		
Sewa	xxx	xxx
Asuransi	xxx	xxx
Lisensi dan Perizinan	xxx	xxx
Jumlah	xxx	xxx

6. UTANG BANK

Pada tanggal 4 Maret 20X8, Entitas memperoleh pinjaman Kredit Modal Kerja (KMK) dari PT Bank ABC dengan maksimum kredit Rpxxx, suku bunga efektif 11% per tahun dengan jatuh tempo berakhir tanggal 19 April 20X8. Pinjaman dijamin dengan persediaan dan sebidang tanah milik entitas.

7. SALDO LABA

Saldo laba merupakan akumulasi selisih penghasilan dan beban, setelah dikurangkan dengan distribusi kepada pemilik.

8. PENDAPATAN PENJUALAN

20x7 20x8

Penjualan	xxx	xxx
(Retur Penjualan)	xxx	xxx
Jumlah	xxx	xxx

9. BEBAN LAIN-LAIN

Bungan Pinjaman	xxx	xxx
Lain-lain	xxx	xxx
Jumlah	xxx	xxx

10. BEBAN PAJAK PENGHASILAN

Pajak Penghasilan	xxx	xxx
-------------------	-----	-----

Sumber : Ikatan Akuntan Indonesia, Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah²⁸

D. Usaha Mikro Kecil dan Menengah**1. Pengertian UMKM**

UMKM diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2008 tentang UMKM. Pasal 1 dari UU tersebut, dinyatakan bahwa Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memiliki kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam UU tersebut. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan anak cabang yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian, baik langsung maupun tidak langsung, dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam UU tersebut.

²⁸ Ikatan Akuntan Indonesia, *Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah*., hal 52-53

Sedangkan usaha mikro adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung, dari usaha mikro, usaha kecil atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana dimaksud dalam UU tersebut.²⁹

Secara umum, tujuan atau sasaran yang ingin dicapai adalah terwujudnya usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang tangguh dan mandiri yang memiliki daya saing tinggi dan berperan utama dalam produksi dan distribusi kebutuhan pokok, bahan baku, serta dalam permodalan untuk menghadapi persaingan bebas. UMKM adalah unit usaha produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha di semua sektor ekonomi. Pada prinsipnya, perbedaan antara Usaha Mikro (UMI), Usaha Kecil (UK), Usaha Menengah (UM), dan Usaha Besar (UB) umumnya didasarkan pada nilai aset awal (tidak termasuk tanah dan bangunan), omset rata-rata per tahun, atau jumlah pekerja tetap. Namun definisi UMKM berdasarkan tiga alat ukur ini berbeda menurut negara. Karena itu, memang sulit membandingkan pentingnya atau peran UMKM antar negara.³⁰

Menurut Keputusan Presiden RI no. 99 tahun 1998 pengertian Usaha Kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dengan bidang usaha yang secara mayoritas merupakan kegiatan usaha kecil dan perlu dilindungi untuk

²⁹ Tulus T.H. Tambunan, *UMKM di Indonesia*, (Bogor : Ghalia Indonesia, 2009), hal.16-19.

³⁰ Tulus Tambunan, *Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia: Isu-Isu Penting*, (Jakarta: LP3ES, 2012), hal. 11

mencegah dari persaingan usaha yang tidak sehat. Beberapa keunggulan UKM terhadap usaha besar antara lain adalah sebagai berikut.

- 1) Inovasi dalam teknologi yang telah dengan mudah terjadi dalam pengembangan produk.
- 2) Hubungan kemanusiaan yang akrab di dalam perusahaan kecil.
- 3) Kemampuan menciptakan kesempatan kerja cukup banyak atau penyerapannya terhadap tenaga kerja.
- 4) Fleksibilitas dan kemampuan menyesuaikan diri terhadap kondisi pasar yang berubah dengan cepat dibanding dengan perusahaan besar yang pada umumnya birokrasi.
- 5) Terdapatnya dinamisme manajerial dan peran kewirausahaan.³¹

2. Kriteria UMKM

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 UMKM memiliki kriteria sebagai berikut :

- a. Usaha Mikro yaitu usaha produktif milik orang perorangan atau badan usaha milik perorangan yang memenuhi kriteria yakni: Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, 2) Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah)
- b. Usaha Kecil, yaitu usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau

³¹Titik Sartika Partomo dan Abd. Rachman Soejoedono, *Ekonomi Skala Kecil/Menengah dan Koperasi*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004), hal. 13

menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria yakni:

- 1) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- 2) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

c. Usaha Menengah, yaitu usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar yang memenuhi kriteria:³²

- 1) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- 2) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

3. Peranan UMKM

Peran UMKM merupakan hal yang sangat penting dalam perekonomian suatu negara dan tidak jarang UMKM diharapkan sebagai mesin pertumbuhan. Di Indonesia sendiri perhatian terhadap UMKM telah menjadi agenda penting dalam

³²Tulus Tambunan, *Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia: Isu-Isu Penting...*, hal 12

rangka bukan hanya untuk memperkuat struktur perekonomian nasional. Tetapi juga penyerapan tenaga kerja. Kehadiran UMKM ini semakin dirasakan dampaknya di Indonesia selama terkena krisis moneter yang akhirnya berkembang menjadi krisis multi dimensi. Pada tahun 1998 UMKM mampu bertahan dibandingkan industry-industri besar.³³

bahwa Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) memainkan peran penting di dalam pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, tidak hanya di negara-negara sedang berkembang (NSB), tetapi juga di negara-negara maju (NM). Di negara maju, UMKM sangat penting, tidak hanya kelompok usaha tersebut menyerap paling banyak tenaga kerja dibandingkan usaha besar (UB), seperti halnya di negara sedang berkembang, tetapi juga kontribusinya terhadap pembentukan atau pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) paling besar dibandingkan kontribusi dari usaha besar.³⁴

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian. Penelitian terdahulu berfungsi untuk mendapatkan gambaran yang akan diteliti dengan peneliti sejenis yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Adapun beberapa penelitian yang dapat digunakan oleh penulis sebagai referensi dan memperkaya bahan kajian penulis sebagai berikut.

³³ Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Malang, *Membangun Ekonomi Nasional yang Kokoh Kajian dan Pengalaman Empiris*, (Malang:UMM Press,2015), hal. 252

³⁴ Tulus Tambunan, *Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia: Isu-Isu Penting*, hal. 1.

Penelitian Tatik³⁵, yang bertujuan untuk mengimplementasi SAK EMKM dengan harapan laporan keuangan laporan keuangan yang disusun dapat menjadi bahan evaluasi kemajuan usaha. Metode penelitian yang digunakan adalah menggunakan penelitian kualitatif dengan metode study kasus. Hasil penelitian menghasilkan laporan keuangan UMKM XYZ yang sesuai sesuai dengan standar SAK EMKM yaitu laporan posisi keuangan, laba rugi, dan catatan atas laporan keuangan. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini adalah sama-sama meneliti mengenai SAK EMKM pada laporan keuangan UMKM. Dan perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini terletak pada objeknya.

Penelitian Salmiah, Nanda, dan Adino,³⁶ yang bertujuan untuk mengetahui Pemahaman Pelaku UMKM Terhadap SAK EMKM Survey pada UMKM yang Terdaftar di Dinas Koperasi dan UKM Kota Pekanbaru. Metode penelitian yang digunakan yaitu analisis statistik deskriptif dengan jenis data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh dari penyebaran kuesioner. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada penelitian mengenai pemahaman terhadap SAK EMKM yang diukur dalam 3 aspek yaitu pengukuran, pencatatan keuangan berdasarkan akrual basis dan penyajian laporan keuangan maka dari itu hasil penelitian yang didapatkan bahwa pemahaman pelaku UMKM terhadap SAK EMKM di kota pekanbaru masih pada tingkat cukup atau memiliki pemahaman yang cukup, pemahaman ini mengenai asumsi dasar yaitu pada konsep akrual basis dan konsep entitas bisnis serta konsep penyajian laporan keuangan. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini adalah sama-sama mengkaji SAK EMKM dan objek penelitian yang sama yaitu pada UMKM. Dan perbedaannya

³⁵ Tatik, *Implementasi SAK EMKM pada laporan keuangan UMKM*, Jurnal Relasi Vol.XIV No 2, Juli 2018

³⁶ Neneng Salmiah, et. all., *Pemahaman Pelaku UMKM Terhadap SAK EMKM Survei Pada UMKM yang Terdaftar di dinas Koperasi dan UKM Kota Pekanbaru*, Akuntansi Dewantara Vol.2 No. 2, Oktober 2018

yaitu pada penelitian terdahulu meneliti tentang pemahaman UMKM terhadap SAK EMKM sedangkan penelitian saat ini tentang penerapan SAK EMKM dalam penyusunan laporan keuangan UMKM.

Penelitian Amani³⁷, yang bertujuan untuk menerapkan SAK EMKM sebagai dasar penyusunan laporan keuangan pada UMKM UD. Dua Putri Sholehah. Penulis menggunakan metode penelitian kuantitatif deskriptif dengan menggunakan data primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa laporan keuangan belum disusun sesuai dengan yang ditetapkan SAK EMKM. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini adalah sama-sama mengenai tentang SAK EMKM pada UMKM, dan perbedaan nya terletak pada metode penelitian terdahulu menggunakan kuantitatif sedangkan penelitian saat ini menggunakan kualitatif.

Penelitian Hetika dan Mahmudah,³⁸ bertujuan untuk menganalisis penerapan akuntansi pada UMKM di kota Tegal dan untuk mengetahui apakah UMKM di kota Tegal sudah menyusun SAK ETAP. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan Penerapan akuntansi yang dilakukan hanya sebatas pada pencatatan transaksi secara manual sekedar untuk mengetahui keluar masuknya kas dan laba yang diperoleh dalam kegiatan usaha, masih belum melakukan penerapan akuntansi sesuai dengan SAK ETAP karena kurangnya pemahaman para pelaku UMKM mengenai SAK ETAP. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari hasil penelitian belum ada sosialisasi atau pelatihan yang berkaitan dengan SAK ETAP maupun SAK EMKM. Persamaan penelitian terdahulu

³⁷ Tatik Amani, *Penerapan SAK EMKM Sebagai Dasar Penyusunan Laporan Keuangan UMKM Di UD Dua Putri Sholehah Probolinggo*, Jurnal Ilmiah Akuntansi Vol 2 No 2, Juli 2018

³⁸ Hetika dan Nurul Mahmudah, *Penerapan akuntansi dan kesesuaian dengan SAK ETAP pada UMKM kota tegal*, Jurnal akuntansi, ekonomi dan manajemen bisnis Vol. 5 No. 2, Desember 2017

dengan penelitian saat ini sama-sama mengkaji Standar Akuntansi Keuangan pada UMKM. Dan perbedaan yaitu pada penelitian terdahulu mengkaji tentang SAK ETAP, sedangkan penelitian saat ini mengkaji tentang SAK EMKM.

Penelitian Yuliaryani dan Herawati,³⁹ yang bertujuan untuk mengetahui pencatatan yang digunakan pada UD. Pak Gex Aluminium, Penerapan SAK EMKM dalam penyusunan laporan keuangan dan dampak yang dirasakan dengan diterapkannya SAK EMKM. Pada penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif dengan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pencatatan keuangan yang dilakukan pada UD. Pak Gex Aluminium masih sangat sederhana, dengan penerapan SAK EMKM dapat diketahui laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, dan CALK, serta dampak yang dirasakan pada penerapan SAK EMKM ini adalah membantu pemilik usaha untuk mengambil keputusan bisnis. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini adalah sama-sama mengkaji SAK EMKM dalam penyusunan laporan keuangan, dan perbedaannya terletak pada objek penelitian.

Penelitian Susanto dan Ainy⁴⁰, yang bertujuan untuk mengetahui penyusunan laporan keuangan usaha mikro berdasarkan SAK EMKM di Fress Frish Bantul. Pada penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UMKM Fress Fish belum melakukan pencatatan sesuai dengan SAK EMKM dan penyusunan laporan keuangan sesuai dengan SAK EMKM. Persamaan penelitian

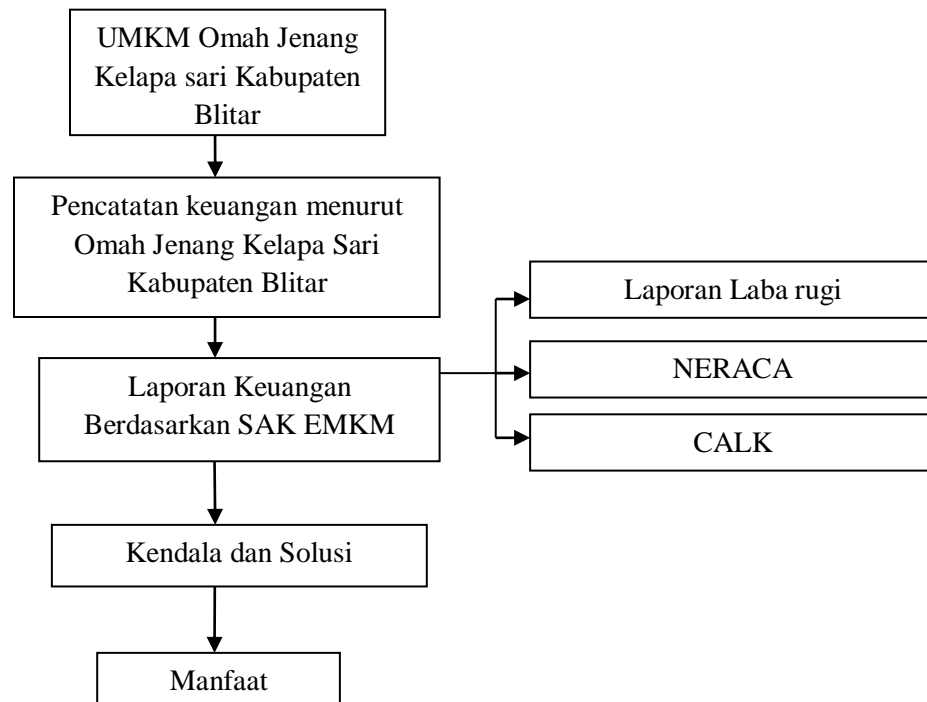
³⁹ Putu Rika Yuliarni Dan Nyoman Trisna Herawati, *Penyusunan Laporan Keuangan Berbasis SAK EMKM Dan Dampaknya Pada UD. Pak Gex Aluminium Di Desa Menyali*, Jurnal Ilmiah Akuntansi, Vol 9 No. 2, Tahun 2018

⁴⁰ Muhammad Susanto Dan Rintan Nuzul Ainy, *Penyusunan Laporan Keuangan Usaha Mikro Kecil Menengah Berdasarkan SAK EMKM Di UMKM Fress Fish Bantul*, Jurnal Akuntansi, Vol 2 No 2 Tahun 2018

terdahulu dengan penelitian saat ini adalah sama-sama mengkaji SAK EMKM dan perbedaannya terletak pada objek penelitian.

F. Kerangka Konseptual

Gambar 2.1
Kerangka Konseptual



Sumber : Data di olah peneliti

Keterangan

Penelitian yang dilakukan di Omah Jenang Kelapa Sari Kabupaten Blitar merupakan UMKM yang memproduksi jajanan tradisional Blitar yaitu jenang. Penelitian berfokus pada penerapan SAK EMKM dalam penyusunan laporan keuangan di Omah Jenang Kelapa Sari Kabupaten Blitar. Penjelasan dari kerangka konseptual berawal dari melihat terlebih dahulu pencatatan keuangan menurut Omah Jenang Kelapa Sari Kabupaten

Blitar, setelah itu penyusunan laporan keuangan di Omah Jenang Kelapa Sari Kabupaten Blitar berdasarkan SAK EMKM yaitu penyusunan laporan laba/rugi, laporan perubahan ekuitas, neraca dan CALK selanjutnya menjelaskan bagaimana kendala dan solusi serta manfaat dari penerapan penyusunan laporan keuangan berdasarkan SAK EMKM.